

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



RANCANGAN

RENJA

TAHUN 2025

BAGIAN

PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT

DAERAH

**KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian merupakan salah satu Dokumen Pelaksanaan Pembangunan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja Bagian Perekonomian ini masih banyak kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing Perangkat Daerah sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Salakan,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos
NIP.19750325 200502 1 004

BAB I

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 maupun Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Rancangan Renja Bagian Perekonomian Tahun 2025 juga berpedoman pada Tupoksi Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.

Selanjutnya mengingat Rancangan Renja Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Bagian Perekonomian, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang System Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 80, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Bagian Perekonomian Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis efektif dan efisien selama Tahun Anggaran 2025.

Selain dari pada itu, penyusunan Rancangan Renja Bagian Perekonomian ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang telah disusun dengan kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Perekonomian yang telah disusun dengan kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Perekonomian adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai



- Kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dilaksanakan secara konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Bagian Perekonomian selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
 3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sistematika penulisan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari : 1.1 Latarbelakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Awal RKPd 2.5 Penelaan usulan dan program kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menindak lanjuti RKPD yang menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah disusun Renja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan usulan anggaran dan program/kegiatan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Pada perencanaan tahun sebelumnya yang tertuang dalam Rencana Kerja Bagian Perekonomian tahun 2024 telah diusulkan 2 Program yang menampung 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan. Adapun total pembiayaan yang diusulkan senilai Rp. 1.406.019.400,-. Namun berdasarkan pembahasan oleh Tim Anggaran mengenai pembiayaan yang dapat dipenuhi ditetapkan bahwa pada APBD Murni tahun 2024 di alokasikan senilai Rp. 1.140.000.000,- yang terdiri dari 2 Program 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan mempertimbangkan beberapa kegiatan baru yang belum terangkum pada Renja tahun 2024 dan efektifitas penggunaan anggaran.

Dan setelah Perubahan APBDP dialokasikan Tetap senilai Rp. 1.140.000.000, Dimana tidak bertambah dan tidak berkurang;

Pada akhir tahun, total pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah Rp. 1.134.958.075,- atau senilai 99,56 % dari keseluruhan Pembiayaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 ditambah Perubahan.

Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2024 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 serta capaian realisasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kepulauan

Bagian Perekonomian Setda

Lembar :

Kode	Urusan /Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target hasil program dan keluara n kegiatan s/d Tahun (2023)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01										
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01	4.01									
	Bidang Urusan Pemerintahan									

4.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
4.01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang direncanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									



4.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang direncanakan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
4.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat tulis kantor dan peralatan kantor dan perlengkapan yang direncanakan	38 Jenis	38 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	100 %	35 Jenis	35 Jenis	100%
4.01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Kebersihan dan alat pembersih yang direncanakan	7 Jenis	7 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100%
4.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah BBM dan Makan Minum rapat yang direncanakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100%



4.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Penggandaan yang direncanakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100%
4.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar Majalah yang direncanakan	2 Media	2 Media	0 Media	0 Media	100 %	1 Media	1 Media	100%
4.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta perjalanan dinas yang direncanakan	15 OK	15 OK	15 OK	15 OK	100 %	10 OK	10 OK	100%
4.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang direncanakan	280 Lembar	280 Lembar	290 Lembar	290 Lembar	100 %	290 Lembar	290 Lembar	100%
4.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Internet dan TV Kabel yang direncanakan	1 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100%
4.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jumlah peserta kegiatan yang direncanakan	21 Ob	21 Ob	17 Ob	17 Ob	100 %	17 Ob	17 Ob	100%

4.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Tersediaannya jumlah pajak kendaraan dinas operasional yang direncanakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	4 Unit	4 Unit	100%
4.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara			1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100%
4.01	03			Program Perekonomian Dan Pembangunan									
4.01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									



4.01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen yang direncanakan	17 Dokumen	17 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
4.01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan yang direncanakan	17 Laporan	17 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %
4.01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan yang direncanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4.01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah laporan yang direncanakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
4.01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan yang direncanakan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi perlu disikapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah, sesuai dengan acuan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :

- 2.1 Sekretaris Daerah
- 2.2 Asisten Pengembangan Ekonomi
- 2.3 Kepala Bagian Perekonomian
 - Sub. Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh 8 (Delapan) orang Pegawai. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Bagian Perekonomian terdiri dari 1 (Satu) orang berpendidikan Sarjana (S2), 3 (Tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), yang dibantu oleh 2 (Dua) orang Staf PNS ,2 (Dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 8 (Delapan) orang Non PNS.

Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon IV/a 3 (tiga) Orang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Bagian Perekonomian merupakan unsur stafPemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokokpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu melaksanakan pengoorganisasian perumusan kebijakan Daerah, pengoorganisasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan



BLUD, Pengendalian dan distribusi Perekonomian, dan perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pengoorganisasian perumusan kebijakan Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - b. Penyiapan bahan pengoorganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi perekonomian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - g. Memfasilitasi dan pembinaan dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - h. Memfasilitasi kebijakan penetapan harga, harga eceran tertinggi bahan bakar minyak dan LPG;
 - i. Memfasilitasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan ;
 - b. Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ;
 - c. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;



- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ;
 - g. Memfasilitasi dan pembinaan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ;
 - h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan dan pengendalian Inflasi Daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi kegiatanpembinaan, monitoring, dan evaluasi program kredit usaha Program; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
3. Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah ;
 - c. Menyiapkan Bahan pembinaan pengelolaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah;
 - d. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah ;
 - e. Melakukan monitoring dan Evaluasi Badan Usaha milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

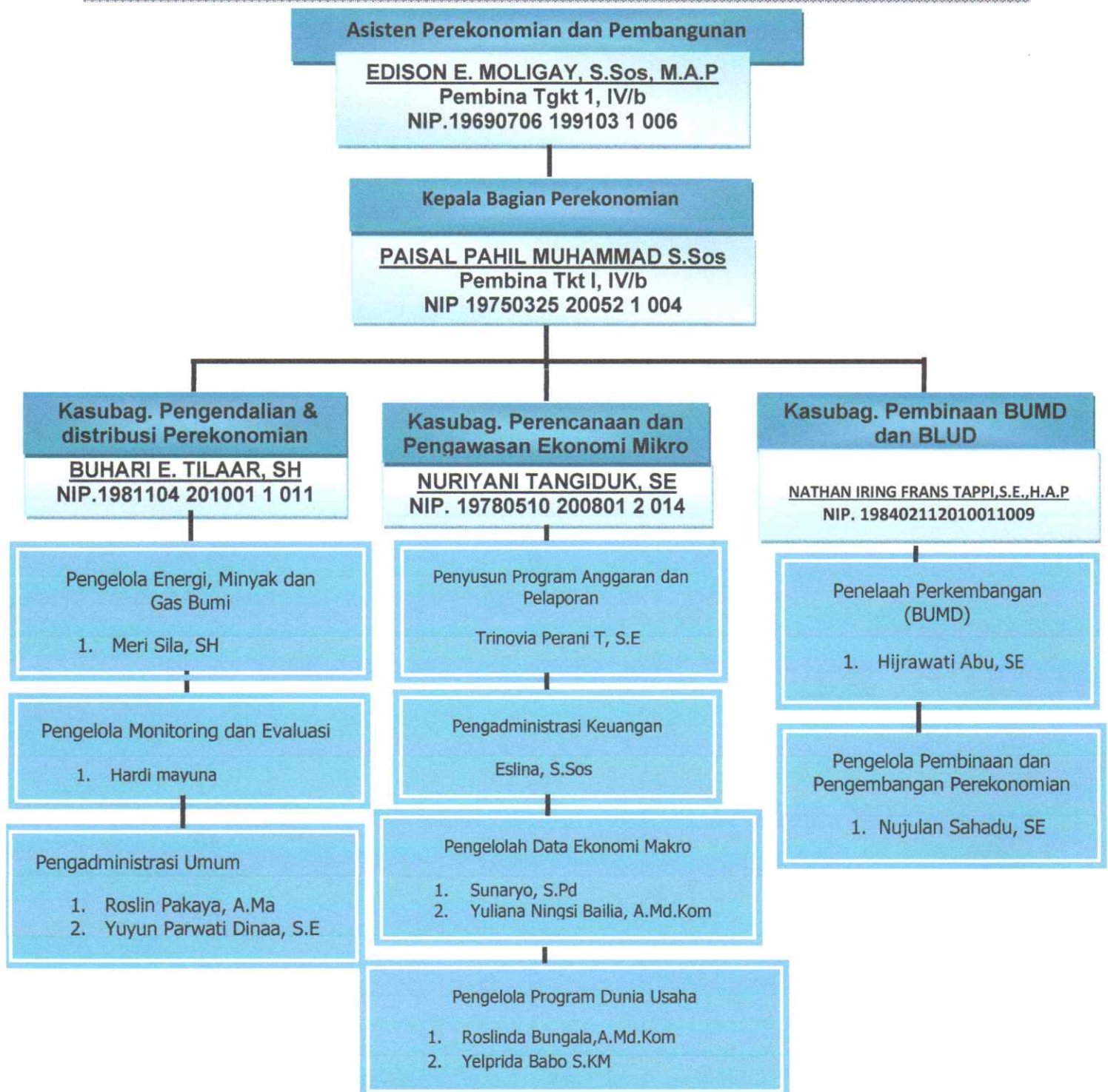
No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tersedia nya Data Harga Sembako , dan Barang Strategis Lainnya			Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada		

	Terlaksana Rapat TPID			Terlaksana	Terlaksana	Ada	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Ada	Terlaksana	Terlaksana	
	Terselesainya Rekomendasi sebagai Acuan dalam Pengendalian Inflasi Daerah			Ada	Ada	Terlaksana	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlaksana	Ada		
	Tersedianya Data Angka Inflasi Kota Salakan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Tersedianya Laporan Rastra			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Terlaksana Sosialisasi Tentang KUR			Terlaksana	Terlaksana	Ada	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Ada	Terlaksana	Terlaksana	
	Terlaksana Rapat Evaluasi Rastra			Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada		
	Tersedianya Laporan BBM dan Gas			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Tersedianya Data BUMD			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Tersedianya			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	Laporan Inflasi Daerah per triwulan													
	Tersedia nya Data Jumlah Pengecer BBM bersubsidi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	



STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan - kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam membantu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Pada umumnya kualitas pelayanan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.



a) Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana antara lain :

No	Nama Bahan/Alat	Jenis/Type	Jumlah Pengadaan Tahun 2016-2022	Ket
1	P.c Unit/Komputer	HP/Pavilion r002	2 Unit	Pengadaan 2016
2	Lap Top	Dell, Inspiron, 145447Core i7	2 Buah	Pengadaan 2016
3	Printer	Epson L360	2 Buah	Pengadaan 2016
4	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Deepcool/Cooler Wind Pall	2 Buah	Pengadaan 2016
5	Harddisk Eksternal	Seagate/ekspansion	2 Buah	Pengadaan 2016 (Rusak)
6	DVD-Rom Drive	Dell External/Gp60N	2 Buah	Pengadaan 2016
7	Mause	Votre/Mouse Optic	2 Buah	Pengadaan 2016
8	Mause	Surface/Mouse Pad gaming	2 Buah	Pengadaan 2016
9	Memory	Sony/sdhc 16 GB/70MBPS Class 10	1 Buah	Pengadaan 2016
10	Meja kerja Eselon III	Melody/Meja Biro Eselon III	1 Buah	Pengadaan 2016
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Alvero/Kursi Sandar Tinggi	1 Buah	Pengadaan 2016
12	Kursi Kerja Staf	Alvero/Kursi Sandar Pendek	6 Buah	Pengadaan 2016 (1 Buah Rusak)
13	Buffet Kayu	/Buffet 4 Pintu	1 Buah	Pengadaan 2016
14	Peralatan Studio Vidio dan Filem Lain-Lain	/Tas Kamera	1 Buah	Pengadaan 2016
15	Camera Elektronik	Soni/Cybershot	1 Buah	Pengadaan 2016
16	Lap Top	Acer/ Aspire E5-475	1 Buah	Pengadaan 2017



17	Meja Biro	Pro design/Meja Biro Olympic	1 Buah	Hibah 2016
18	Kursi Lipat	Cithose/kursi Staf	8 Buah	Hibah 2016
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Polaris /-	1 Buah	Hibah 2016
20	AC Unit	Sharp /-	1 Buah	Hibah 2016
21	AC Split	Polytron /-	1 Buah	Hibah 2016
22	Meja Kerja	Melody/ Meja Komputer	1 Buah	Hibah 2016
23	Lemari Arsip	Oggi/OG.414.A/3 pintu	1 Buah	Hibah 2016
24	Station Wagon	Toyota /New Avanza Velos	1 Unit	Mutasi Barang 2018
25	Printer	Epson/L3100 Series Model C634D	1 Unit	Pengadaan 2019
26	Hardisk Eksternal	Toshiba/DTB410	2 Unit	Pengadaan 2019
27	Scanner	Epson	1 Unit	Pengadaan 2019
28	Motor	Yamaha	3 Unit	Pengadaan 2019
29	Lap Top	Acer/ Aspire 5 A514-54G-78WV	1 Buah	Pengadaan 2021
30	Lap Top	Asus Vivobo OK A416EPO -VIPS754 (GRAY)	2 Buah	Pengadaan 2022
31	Lap Top	Lenovo Laptop-FORIJTHK	1 Buah	Pengadaan 2022
32	Lap Top	Lenovo Laptop-JPRM88C9	1 Buah	Pengadaan 2022
33	Lap Top	Hp/14s-dq5002TU	2 Buah	Pengadaan 2023



34	AC 1 PK	Daikin/Rp25AV15	3 Buah	Pengadaan 2023
35	Printer	EPSON L3250	3 Buah	Pengadaan 2023
36	Scenner	Epson Genune APP(Call Center 1-500-766) Seagate	1 Buah	Pengadaan 2023
37	Proyektor	Sonic	1 Buah	Pengadaan 2023
38	Hardis	Epson Genune APP(Call Center 1-500-766) Seagate	1 Buah	Pengadaan 2023
39	Laptop	Lenovo DEKSTOP-PUTMVU1	3 Buah	Pengadaan 2024
40	PC	HP 710 Wireless KB MS Combo	2 Buah	Pengadaan 2024
41	Printer	Epson L3550	2 Buah	Pengadaan 2024
JUMLAH			74 Buah	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perekonomian sebagai Fasilitas, Koordinator dan Katalisator Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Ekonomi akan menghadapi berbagai tantangan dan Permasalahan dari Lingkungan Strategis, Lingkungan Internal maupun Eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kinerja Bagian Perekonomian masih terbatas;



2. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banggai Kepulauan memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menciptakan model yang tepat guna dan tepat sasaran ;
3. Penyusunan laporan pencapaian target ekonomi memerlukan koordinasi dengan stakeholders terkait ;
4. Koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal, sehingga tingkat inflasi yang dipicu oleh bahan makanan masih rentan terjadinya masih perlu ditingkatkan;
5. Belum Terbangunnya Kerja Sama dengan Stakeholder terkait (Bank pemerintah) sehingga data Calon Debitur tidak dapat terimput melalui SIKP dan belum dilaksanakannya monev Tim Terpadu (Pemda dan Bank Penyalur) terhadap Keberhasilan Program Pemerintah melalui Bantuan Subsidi Bunga (KUR)
6. Belum Optimalnya Kerjasama antar dinas Teknis terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah sehingga Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah belum terlaksana dengan Baik;
7. Belum adanya informasi yang dapat diakses masyarakat tentang ketersediaan stok bahan pangan;
8. Informasi harga pangan strategis masih memerlukan sosialisasi dan pengembangan lebih lanjut;
9. Informasi dan ketersediaan data mengenai mata rantai jalur distribusi komoditi pertanian masih terbatas;
10. Penyaluran kredit untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas dengan melakukan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dan Bank Penyalur;
11. Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan secara umum masih rendah khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian;
12. Peran lembaga keuangan lainnya dalam hal pembiayaan aktivitas perekonomian masyarakat masih memerlukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga yang terkait utamanya di tingkat Kabupaten.

2.3.2 Dampak Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Kepala Daerah

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil - hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun otonom. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.



2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian berbagai permasalahan dan tantangan yang akan di hadapi di masa mendatang yang perlu menjadi fokus perhatian antara lain:

1. Sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kinerja Administrasi Perekonomian masih perlu ditingkatkan;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banggai Kepulauan memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menciptakan model yang tepat guna dan tepat sasaran;
3. Koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih intensif;
4. Peningkatan produksi sektor pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan memerlukan koordinasi yang intensif ;
5. Informasi ketersediaan stok bahan pangan perlu ditingkatkan;
6. Informasi harga pangan strategis masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut;
7. Informasi dan ketersediaan data mengenai mata rantai jalur distribusi komoditi pertanian masih terbatas;
8. Penyaluran kredit untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas;
9. Penyaluran kredit kepada koperasi dan UMKM masih memerlukan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif;
10. Belum adanya wadah yang berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan secara partisipatif yang dapat mewujudkan kebersamaan untuk menyelesaikan problem UMKM di Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Peran lembaga keuangan lainnya dalam hal pembiayaan masih memerlukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif utamanya di tingkat Kabupaten.



Tabel 2.4
Review terhadap Awal RKPd Tahun 2024
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Awal RKPd					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salakan	Jumlah Dokumen Yang direncanakan	100%	28.164.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salakan	Jumlah Dokumen Yang direncanakan	100%	28.164.000	

2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Salakan	Jumlah Dokumen yang di rencanakan	0%	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Salakan	Jumlah Dokumen yang di rencanakan	0%	0	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salakan	- Jumlah Alat Tulis Kantor dan peralatan kantor dan Kantor yang direncanakan	100%	111.213.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salakan	- Jumlah Alat Tulis Kantor dan peralatan kantor dan Kantor yang direncanakan	100%	111.213.600	



6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah Peralatan dan Kebersihan Kantor yang direncanakan	100%	972.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salakan	Jumlah Peralatan dan Kebersihan Kantor yang direncanakan	100%	972.700	
6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salakan	Jumlah BBM dan makan Minum yang direncanakan	100%	16.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salakan	- Jumlah BBM dan makan Minum yang direncanakan	100%	16.000.000	
6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang direncanakan	100%	10.261.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang direncanakan	100%	10.261.000	
6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Salakan	Jumlah surat kabar /majalah yang direncanakan	0%	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Salakan	Jumlah surat kabar /majalah yang direncanakan	0%	0	



6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salakan	Jumlah peserta perjalanan Dinas yang direncanakan	100%	46.070.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salakan	Jumlah peserta perjalanan Dinas yang direncanakan	100%	46.070.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	Jumlah Materai yang direncanakan	100%	3.480.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	Jumlah Materai yang direncanakan	100%	3.480.000	
8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salakan	Tersedianya Jaringan Internet dan TV Kabel	0%	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salakan	Tersedianya Jaringan Internet dan TV Kabel	0%	0	
8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salakan	Tersedianya jumlah peserta kegiatan yang direncanakan	100%	228.090.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salakan	Tersedianya jumlah peserta kegiatan yang direncanakan	100%	228.090.000	



2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salakan	Tersedianya jumlah pajak kendaraan dinas operasional yang direncanakan	100%	9.904.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salakan	Tersedianya jumlah pajak kendaraan dinas operasional yang direncanakan	100%	9.904.000	
2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	700.000	
03	Program Perekonomian Dan Pembangunan					Program Perekonomian Dan Pembangunan					



2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
1.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Salakan	Jumlah kegiatan yang direncanakan	100%	355.044.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Salakan	Jumlah kegiatan yang direncanakan	100%	355.044.000	
1.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Salakan	Jumlah Kegiatan yang direncanakan	100%	56.142.600	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Salakan	Jumlah Kegiatan yang direncanakan	100%	56.142.600	
1.05	Koordinasi , Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pendirian BUMD dal BLUD	Salakan	Jumlah laporan yang direncanakan	100%	67.448.500	Koordinasi , Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Salakan	Jumlah laporan yang direncanakan	100%	67.448.500	
2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					



4.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Salakan	Jumlah Laporan yang direncanakan	100%	206.509.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Salakan	Jumlah Laporan yang direncanakan	100%	206.509.600	
Jumlah					1.140.000.000	Jumlah					1.140.000.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2023
Kabupaten Banggai Kepulauan

Bagian Perekonomian Setda

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk keberhasilan pencapaiannya perlu ditetapkan Tujuan Bagian Perekonomian yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender;
2. Menekan Laju Inflasi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Meningkatkan kinerja BUMD dan UMKM dan Koperasi;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui koordinasi dan evaluasi dengan SKPD terkait;
6. Pengentasan kemiskinan melalui evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang ekonomi;
7. Peningkatan koordinasi dan evaluasi kestabilan harga bahan pokok;
8. Peningkatan pameran produksi daerah melalui SKPD terkait;
9. Pengawasan penyaluran bantuan modal untuk pengusaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
10. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait.
11. Peningkatan Pengawasan Penyaluran BBM bersubsidi.
12. Meningkatkan Pembinaan BUMDES

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Bagian Perekonomian pada periode 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik;
2. Mengendalikan tingkat inflasi daerah;
3. Meningkatkan Akses informasi harga sembako dan bahan strategis untuk Bahan Penyusunan Angka Inflasi ;
4. Tersedianya Angka Inflasi Kota Salakan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah terutama Tim Pengendalian Inflasi untuk merumuskan Kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi ;
5. Peningkatan Pengawasan BBM;



6. Meningkatnya pemasaran hasil produk daerah dengan berkoordinasi dengan OPD Teknis Terkait;
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai target Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
8. Adanya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah Kabupaten;
9. Terlaksananya sinergitas program dalam pengembangan sarana ekonomi;
10. Meningkatnya pelayanan fasilitas sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata melalui Koordinasi dengan SKPD terkait;
11. Terlaksananya sinergitas program dalam pengembangan industri dan perdagangan melalui Koordinasi dengan SKPD terkait;
12. Iklim yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan;
13. Meningkatnya kinerja BUMD;

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2026.

Dokumen Renja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2024 seperti yang tertuang dalam DPA Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

- **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

- **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
 - Pengendalian dan distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD

- **Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam**
 - Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air



BAB. IV

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4	01			Bidang Urusan Pemerintahan				594.845.550				1.678.377.100
4	01	01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota				259.605.550				864.864.700
4	01	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000				34.540.000

4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salakan	4 Dokumen	5.000.000	DAU		4 Dokumen	34.540.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0				5.400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Tepra dan Monev Online dan LKJIP	Salakan	16 Dokumen	0	DAU		16 Dokumen	5.400.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				111.900.000
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga yang di Adakan	Salakan	14 Pasang	0	DAU		15 Pasang	12.000.000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jakarta	6 OK	0	DAU		5 OK	99.900.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				112.799.050				289.702.700



4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Salakan	1 Paket	10.839.050	DAU		2 Paket	134.111.400
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Salakan	1 Paket	1.323.500	DAU		1 Paket	1.146.300
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Salakan	2 Paket	16.500.000	DAU		2 Paket	17.500.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Salakan	1 Paket	7.916.500	DAU		1 Paket	8.030.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/ Majalah yang direncanakan	Salakan	1 Media	0	DAU		2 Media	3.600.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Palu, Kabupaten Banggai /Kab.Lai	12 Laporan	76.220.000	DAU		13 Laporan	125.315.000

							nnya						
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0				114.500.000
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang direncanakan	Salakan	2 Unit	0	DAU		2 Unit	50.000.000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang direncanakan	Salakan	13 Unit	0	DAU		15 Unit	64.500.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.400.000				265.680.000
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salakan	4 Laporan	4.800.000	DAU		4 Laporan	7.200.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Internet dan TV Kabel	Salakan	1 Jenis	0	DAU		1 Jenis	600.000

4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Salakan	16 Laporan	123.600.000	DAU		16 Laporan	257.880.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.406.500				43.142.000
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Salakan	4 Unit	9.906.500	DAU		4 Unit	32.642.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Salakan	1 Unit	3.500.000	DAU		3 Unit	10.500.000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan				335.240.000				813.512.400
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				283.740.000				668.823.800



4	01	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Salakan	5 Dokumen	51.500.000	DAU		17 Dokumen	139.851.500
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan distribusi Perekonomian	Salakan	38 Laporan	232.240.000	DAU		38 Laporan	404.217.700
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Salakan	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	124.754.600
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laopran yang direncanakan	Salakan	1 Kegiatan		DAU		1 Kegiata n	0
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam				51.500.000				144.688.600



4	01	03	2.04	01	Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				-				-
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup				-				
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Salakan	21 Dokumen	51.500.000	DAU		21 Dokumen	144.688.600
Jumlah									594.845.550	DAU			1.678.377.100



BAB V PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang - Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam awal Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis tersebut.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen Renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab.Banggai Kepulauan Pada Tahun 2025.

Salakan,
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos
NIP.19750325 200502 1 004

